

Merah-Putih Berkibar di Istana Kota Terlarang dan Lapangan Tiananmen

BEIJING (IM) - Bendera Merah-Putih berkibar di Istana Kota Terlarang dan Lapangan Tiananmen, Beijing, saat Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok, Senin (25/7) dan Selasa (26/7).

Merah-Putih bersanding dengan bendera nasional Tiongkok di dua ikon wisata kelas dunia yang berada tepat di titik nol kilometer Beijing itu.

"Ini salah satu bentuk dukungan kami terhadap kerja sama Tiongkok dengan Indonesia yang berjalan semakin baik," kata seorang perwira polisi yang bertanggung jawab atas keamanan Istana Kota Terlarang-Tiananmen, Selasa (26/7).

Kunjungan Jokowi itu ke Beijing dilakukan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Jokowi adalah salah satu di antara sangat sedikit kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengadakan kunjungan kenegaraan selama pandemi Covid-19.

Momentum seperti itu menjadi semakin langka

karena Jokowi ditemui secara langsung oleh Xi di Beijing.

Karena itu, pengibaran bendera Merah-Putih di Istana Kota Terlarang dan Tiananmen juga merupakan kejadian sangat langka.

Bendera Indonesia itu berkibar di tengah liburan sekolah akhir semester, yang bersamaan dengan liburan musim panas di Tiongkok sehingga menjadikan Istana Kota Terlarang dan Lapangan Tiananmen dipadati ribuan wisatawan sejak pagi hingga sore hari.

Presiden Jokowi beserta istri Iriana Jokowi dan jajaran kabinetnya tiba di Bandara Udara Internasional Ibu Kota Beijing (BCIA) pada Senin pukul 21.30 waktu setempat (20.30 WIB).

Presiden Jokowi diadwalkan bertemu dengan Presiden Xi dan Perdana Menteri Li Keqiang pada Selasa sore di gedung tamu kenegaraan Diaoyutai, Beijing.

Kunjungan tersebut dilakukan melalui mekanisme lingkaran tertutup (close loop), mengingat Tiongkok masih menerapkan kebijakan nol kasus Covid-19. ● han

Tim Khusus Polri Terbang ke Jambi untuk Persiapan Ekshumasi Brigadir J

JAKARTA (IM) - Tim khusus Polri kasus penembakan Brigadir J berangkat ke Jambi pada Selasa (26/7), untuk persiapan mengikuti proses autopsi ulang atau ekshumasi terhadap jasad Brigadir J alias Yosua.

Seluruh pihak terkait di perkara ini, telah menyepakati melakukan autopsi ulang terhadap jasad Brigadir J yang tewas ditembak Bharada E pada hari ini, Rabu (27/7).

"Hari ini (Selasa, 26/7) semua tim sudah berangkat ke Jambi," kata Kadiv Humas Polri Irfan Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (26/7).

Bersamaan dengan tim khusus, pihak lainnya seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI), Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, dan Pusdokkes Polri juga akan tiba di Jambi pada hari ini.

Polri menyatakan bahwa sejauh ini ada tujuh dokter forensik yang akan terli-

bat dalam proses autopsi ulang Brigadir J terkait kasus dugaan penembakan di rumah dinas Kadiv Propam. "Kalau dari perhimpunan kedokteran forensik Indonesia yang saya sudah dapatkan informasi ada 7 orang, namanya saya tidak hafal," ujar Dedi.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, beberapa pihak akan turun langsung memantau proses autopsi ulang. Diantaranya adalah, Pusdokkes dan Puslabfor Polri, Komnas HAM, Kompolnas dan pihak keluarga serta pengacara.

"Kita akan menjelaskan se jelas-jelasnya, tentu nanti Komnas HAM akan menilai secara utuh dan komprehensif, Komnas HAM akan menyampaikan hasil temuannya, tidak ada yg kita tutupi," kata Ramadhan di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Senin 25 Juli 2022. ● lus

Diduga Banyak Pihak yang Kecipratan Uang Suap dari Bupati Mamberamo Tengah

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga banyak pihak kecipratan aliran uang panas suap dan gratifikasi dari Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak (RHP).

Presenter cantik TV swasta, Brigita P Manohara, diduga ikut kecipratan uang haram tersebut.

Fakta ini terungkap setelah penyidik rampung memeriksa Brigita P Manohara sebagai saksi pada Senin (25/7) kemarin.

"Brigita Purnawati Manohara. Saksi ini hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka RHP (Bupati Mamberamo Tengah) ke beberapa pihak yang satu di antaranya diterima oleh saksi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (26/7).

Brigita mengakui bahwa ia pernah menerima uang dan hadiah dari Ricky. Ia pun berjanji mengembalikan uang dan hadiah tersebut. KPK mengapresiasi pengakuan dan niatan Brigita untuk mengembalikan uang serta hadiah dari Ricky.

"KPK apresiasi sikap kooperatif saksi yang hadir dan akan mengembalikan sejumlah uang maupun barang yang pernah diterima dari tersangka dimaksud," ujar Ali.

"Berikutnya akan dianalisis untuk kemudian dikonfirmasi lagi pada tersangka maupun berbagai pihak yang akan dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik," katanya.

Usai diperiksa kemarin, Brigita sempat mengakui pernah menerima uang dan hadiah dari Ricky Ham Pagawak. Uang dan hadiah yang diberikan Ricky, kata Brigita, merupakan apresiasi atas kerjanya sebagai presenter TV dan konsultan komunikasi.

"Pada proses tadi saya menyampaikan fakta, saya pernah mengenal tersangka dan saya pernah menerima aliran dana serta hadiah dari tersangka sebagai apresiasi atas profesi saya yakni presenter dan konsultan komunikasi," kata Brigita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

"Seluruh aliran dan hadiah yang disinyalir adalah hasil dari korupsi oleh tersangka, pengembaliannya saya koordinasikan lebih lanjut dengan penyidik," katanya.

Sekadar informasi, KPK sedang menyidik kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua. KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait dugaan suap dan gratifikasi di Pemkab Mamberamo Tengah.

KPK juga sudah mengantongi sejumlah nama tersangka dalam penyidikan kasus ini. Salah satunya Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di Mamberamo Tengah Papua tersebut.

KPK akan mengumumkan secara resmi konstruksi perkara serta pihak-pihak yang telah ditetapkan tersangka setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. KPK berjanji transparan dalam proses penyidikan perkara ini.

Ricky Pagawak juga telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron KPK. Sebab, ia kabur saat hendak dijemput paksa KPK setelah dua kali mangkir dipanggil sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ricky kabur ke Papua Nugini melalui jalur tidak resmi. ● mei

2 Polhukam

FOTO:ANT



Periksa 7 Ajudan Ferdy Sambo, Komnas HAM Gali Konstruksi Perkara Tewasnya Brigadir J

Pemeriksaan terhadap 7 ajudan Ferdy Sambo, Komnas HAM menggunakan dua model. Pertama, mereka diperiksa sendiri-sendiri dan kemudian diperiksa secara bersama-sama.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa tujuh ajudan atau aide de camp (ADC) Irfan Pol Ferdys Sambo. Salah satunya Bharada E, ajudan yang terlibat baku tembak hingga menewaskan Brigadir J.

Namun, hingga pukul 11.51 WIB, baru lima ajudan di luar Bharada E yang terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemeriksaan dilaku-

kan agar pihaknya mendapatkan satu informasi yang penting guna menggambarkan rangkaian peristiwa baku tembak pada Jumat (8/7).

"Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir J ini," kata Anam di Gedung Komnas HAM, Selasa (26/7).

"Jadi kami kepingin komprehensif, analisa analisa yang berkembang di publik saat ini, kami kepingin tahu persis apa

dan bagaimana peristiwa itu terjadi," katanya.

Anam mengatakan sistem pemeriksaan kepada para ajudan nantinya akan memakai dua model. Pertama dengan sendiri-sendiri dan kedua secara bersama-sama.

"Ada dua model yang akan kami lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami pengen tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa dan sebagainya," ucapnya.

Pemeriksaan juga akan mengkonfirmasi berbagai temuan dari Komnas HAM yang sebelumnya telah dilakukan ahli dan tim forensik. Termasuk terhadap satu temuan yang dianggap menjadi kunci dalam kasus ini.

Bharada E, sosok yang disebut-sebut terlibat di peristiwa

baku tembak dan menewaskan Brigadir J baru tiba di Gedung Komnas HAM, Selasa (26/7) pukul 13.20 WIB. Padahal jadwal pemeriksaan ketujuh ajudan Irfan Ferdy Sambo dijadwalkan ukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pantauan di kantor Komnas HAM, Bharada E tiba dengan mengenakan

SIDANG PERDANA GUGATAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) memimpin sidang perdana permohonan *judicial review presidential threshold* bersama Hakim Konstitusi Enny Nurbaningih (kiri) dan Saldi Isra (kanan) di Jakarta, Selasa (26/7). Sidang perdana atas permohonan yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragenda pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materi.

Dokter yang Bakar Bengkel di Tangerang Divonis 8 Tahun Bui

TANGERANG (IM) - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis Mery Anastasia, dokter yang didakwa membakar bengkel hingga menewaskan kekasihnya, dengan hukuman penjara 8 tahun.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim Yulianti berdasarkan putusan Nomor 1988/PIDB/2021/PN Tng.

Ditemui usai sidang, Humas PN Tangerang Arief B Cahyono mengatakan, Mery dinyatakan bersalah dan terbukti melanggar Pasal 187 ayat 1 KUHP.

"Dokter Mery Anastasia perkaranya hari ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang," ujar Arief di PN Tangerang, Senin (25/7).

Dalam putusannya, kata Ar-

ief, hakim menyatakan Mery terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain. Pasca-putusan, JPU dan kuasa hukum terdakwa mengajukan banding. Sehingga, status Mery kini menjadi tahanan Pengadilan Tinggi Banten.

"JPU menyatakan tidak puas terhadap putusan dan menyatakan banding. Keduanya menyatakan banding. Selanjutnya sidang di Pengadilan Tinggi Banten," jelas Arief.

Sebelumnya, Mery didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap tiga orang atau satu keluarga, pemilik bengkel di Cibodas, Tangerang. Dia dituntut penjara selama 12 tahun. ● mei

Mardani Maming Resmi Buronan KPK

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasukan nama Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Mardani Maming dalam daftar pencarian orang (DPO). Artinya, Mardani Maming kini resmi menjadi buronan KPK.

Status buron tersebut disematkan KPK setelah Maming 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka. Maming merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan izin usaha tambang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"KPK telah memanggil tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak 2 kali namun tidak hadir sehingga kami menilai tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui pesan singkat keada wartawan, Selasa (26/7).

"Hari ini (Selasa 26/7), KPK memasukan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," tuturnya.

KPK telah meminta bantuan Polri untuk membantu menangkap Maming. Sebelumnya, KPK telah melakukan upaya jemput paksa Maming dari apartemennya di daerah Jakarta Selatan. Namun, KPK gagal menemukan Maming. KPK mengimbau Maming untuk segera menyerahkan diri.

"KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," kata Ali.

"Di samping itu jika ma-

syarat memiliki informasi, silakan dapat menghubungi langsung KPK melalui call center 198 atau Kantor Kepolisian terdekat yang dapat segera ditindaklanjuti," sambungnya.

Menurut Ali, peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan. Sebab, KPK berharap penyelesaian perkara ini dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien.

Saat ini KPK tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. KPK telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming sebagai tersangka.

Penetapan tersangka tersebut sejalan dengan pencegahan Maming untuk bepergian ke luar negeri. Maming dicegah untuk bepergian ke luar negeri bersama adiknya, Rois Sunandar, selama enam bulan kedepan terhitung sejak Juni 2022.

Hingga saat ini KPK masih enggan membeberkan secara terang benderang siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu. KPK akan mengumumkan para tersangka kasus ini setelah adanya proses penangkapan dan penahanan.

"KPK akan menyampaikan pada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, kronologi uraian perkara hingga pasal apa saja yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," tutur Ali. ● han

KPK Panggil 8 Perwira TNI AU Terkait Kasus Korupsi Helikopter AW-101

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil satu perwira tinggi (Pati) dan tujuh perwira menengah (Pamen) di lingkungan TNI Angkatan Udara (AU). Mereka diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, delapan perwira itu diperiksa sebagai saksi pada Selasa (26/7).

"Pemeriksaan dilakukan di Puspom TNI AU Gedung Satekening," kata Ali dalam

pesan tertulisnya kepada wartawan.

Ali menjelaskan bahwa ketujuh perwira itu adalah Marsda Supriyanto Basuki, Kolonel Tek Agus Kamal, Kolonel Kal Benni Prabowo, Kolonel Kal Fransiskus Teguh Santosa, Kolonel Tek Hendri-son Syafril.

Kemudian, Kolonel Lek Andi S. Pambudi, Kolonel Kal Ahsanul Amaly dan Kolonel Kal Muklis.

Namun Ali belum menjelaskan lebih lanjut apa yang didalam tim penyidik

KPK dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menah-tersempit dalam kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101. Mereka adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh atau John Irfan Kenway pada 24 Mei lalu.

KPK menduga perbuatan Irfan membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 224 miliar dari nilai kontrak Rp 738,9 miliar. ● han



BHARADA E TIBA DI KOMNAS HAM

Ajudan Irfan Pol Ferdys Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E (kiri) berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7). Kedatangan Bharada E tersebut untuk diminta keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irfan Pol. Ferdys Sambo.

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan penerbitan PT Magenta Sinar Abadi (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 21 April 2021 No. 70, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 27 Juli 2022 Likuidator PT MAGENTA SINAR ABADI (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan penerbitan PT Suar Mutlira Semesta (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 26 April 2021 No. 79, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 27 Juli 2022 Likuidator PT SUAR MUTLIRA SEMESTA (dalam Likuidasi)

PENGUMUMAN
Sehubungan dengan penerbitan PT BERDIKARI JAYA ABADI (dalam likuidasi) [Perseroan] berdasarkan akta tanggal 21 April 2021 No. 72, dibuat dihadapan SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan ini Likuidator mengumumkan rencana pembayaran kekayaan hasil likuidasi yaitu karena Perseroan tidak mempunyai hutang, maka hasil likuidasi dibagikan kepada para pemegang saham sebagai pengembalian modal mereka.
Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tangerang, 27 Juli 2022 Likuidator PT BERDIKARI JAYA ABADI (dalam Likuidasi)